DOKUMEN KURIKULUM

Program Studi Administrasi Publik UPN "Veteran" Jawa Timur

2023 - 2028



PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UPN "VETERAN" JAWA TIMUR
2023

DOKUMEN

Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi

Program Studi Administrasi Publik

Surabaya, 31 Juli 2023

Nama Ketua Tim : Dra. Susi Hardjati, M.AP
NIP / NIDN : 196902101993032001/0010026904
Program Studi : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
2023 - 2028

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET , DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Raya RungkutMadya, GunungAnyar, Surabaya 60294 Telp. 031-8706369
Email :fisip@upnjatim.ac.idFaximile : 031-8706372 Laman : http//www.upnjatim.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
Nomor: 16 / UN63.4/SKEP/XI/2023

Tentang

PENETAPAN KURIKULUM BERBASIS OUTCOME BASED EDUCATION (OBE) PADA PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UPN VETERAN JAWA TIMUR TAHUN AKADEMIK 2023/2024

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

Menimbang : Bahwa dalam rangka mengimplementasikan kurikulum yang berbasis Outcome Based Education (OBE) pada program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) maka perlu ditetapkan daftar mata kuliah yang dapat diambil oleh mahasiswa Pada Program Studi Administrasi Publik di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik UPN "Veteran" Jawa Timur.

Mengingat :
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Buku Panduan Merdeka Belajar – Kampus, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemneterian Pendidikan dan Kebudayaan, Tahun 2020
6. Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur Nomor: KEP/155/UN.63/2019, tentang Standar Pendidikan Tinggi Bidang Akademik Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
7. Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur Nomor: 89/UN.63/U/2020, tentang Implementasi Pembelajaran Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Memperhatikan :
1. Program Kegiatan TA 2023/2024 Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UPN"Veteran" Jawa Timur
2. Dokumen Penyusunan Kurikulum Merdeka Belajar – Kampus Merdeka BerbasiS Outcome Base Education (OBE) di Prodi Administrasi Publik UPN "Veteran" Jawa Timur mulai TA 2023/2024
3. Panduan Implementasi Merdeka Belajar – Kampus Merdeka Tahun 2020 Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
4. Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi Ilmu Komunikasi

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
1. Kurikulum berbasis Outcome Based Education (OBE) pada program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka di lingklungan Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UPN Veteran Jawa Timur
2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal :01 Nopember 2023

DEKAN

Dr. Catur Suratnoaji, MSi
NIP. 1968041820212110

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumus	Binti Azizatun Nafi'ah, S.IAN., M.PA	Tim Task Fore Kurikulum		31 Juli 2023
Pemeriksa	Dra. Susi Hardjati, M.AP	Koorprodi Administrasi Publik		31 Juli 2023
Persetujuan	Dr. Yuli Candrasari, MSi	Wakil Dekan 1		31 Juli 2023
Penetapan	Dra. Susi Hardjati, M.AP	Koorprodi Administrasi Publik		31 Juli 2023
Pengendalian	Dr. Diana Hertati, MSi	Kegtua Gugus Penjamin Mutu Prodi		31 Juli 2023

DAFTAR ISI

Cover ii
Surat Keputusan Dekan iii
Pengesahan Dokumen Kurikulum iv
Daftar Isi v
Kata Pengantar vii
Identitas Program Studi viii
I. LANDASAN PENGEMBANGAN KURIKULUM 1
1.1. University Value 1
1.2. Landasan Filosifi 1
1.3. Landasan Historis 2
1.4. Landasan Hukum 3
II. VISI, MISI DAN TUJUAN PENDIDIKAN 5
2.1. Visi dan Misi Fakultas 5
2.2. Visi dan Misi Program Studi 6
2.3. Tujuan Pendidikan Program Studi 7
III. EVALUASI KURIKULUM DAN TRACER STUDY 8
3.1. Evaluasi Kurikulum 8
3.2. Tracer Study 9
IV. PROFIL LULUSAN DAN RUMUSAN CAPAIAN PEMBELAJARAN 10
4.1. Profil Lulusan 10
4.2. Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan 11
4.3. Matrik Hubungan CPL Dengan Profil Lulusan 12
V. PENENTUAN BAHAN KAJIAN 16
5.1. Bahan Kajian 16
5.2. Deskripsi Bahan Kajian 17
VI. MATRIK CPL TERHADAP PEMBENTUKAN MATA KULIAH DAN PENENTUAN BOBOT SKS 18
VII. ORGANISASI MATA KULIAH PROGRAM STUDI 22
VIII. DAFTAR SEBARAN MATA KULIAH TIAP SEMESTER 29
IX. PENILAIAN HASIL BELAJAR 33
X. PEMBELAJARAN MELALUI MBKM 35
XI. RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) 38
XII. PENGELOLAAN PEMBELAJARAN 56

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas penyertaan-Nya sehingga tim penyusun mampu menyusun dan menyelesaikan kurikulum Program Studi Sarjana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur (UPNVJT) tahun 2023-2028. Kami mengucapkan terima kasih kepada jajaran pimpinan UPNVJT dan Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan petunjuk, arahan, bantuan sarana prasarana selama pelaksanaan penyusunan kurikulum ini.

Dokumen kurikulum ini disusun dalam rangka merumuskan Profil, Capaian Lulusan serta materi pembelajaran yang sesuai untuk menjamin kualitas mutu mahasiswa Program Studi Administrasi Publik. Semoga kurikulum ini dapat digunakan sebagai dasar pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi, terutama bidang pendidikan di lingkungan Program Studi Administrasi Publik. Penyusunan kurikulum ini mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

Tim penyusun menyadari bahwa dalam proses penyusunan dokumen kurikulum ini masih banyak terdapat kekurangan. Namun demikian, tim penyusun berharap dokumen ini dapat bermanfaat dan memenuhi harapan dari seluruh stakeholders pendidikan tinggi.

Surabaya, Juli 2023
Koorprodi Administrasi Publik

Dra. Susi Hardjati, M.AP

IDENTITAS PROGRAM STUDI

No	Nama PerguruanTinggi (PT)	UPN VETERAN JAWA TIMUR
1	Fakultas	Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
2	Program Studi	Administrasi Publik
3	Status Akreditasi	Unggul / Internasional FIBAA
4	Jumlah Mahasiswa	1174 (Gasal 2023/2024)
5	Jumlah Dosen	21 (Gasal 2023/2024)
6	Alamat Prodi	Gunung Anyar
7	Telp	(0623) 18706369
8	Web Prodi/Dep.	https://adneg.upnjatim.ac.id

I. LANDASAN PENGEMBANGAN KURIKULUM

1.1 University Value

Salah satu ciri khas dari UPN Veteran Jawa Timur adalah Branding UPN sebagai Kampus Belanegara. Hal ini tertuang dalam Statuta UPN Jawa Timur berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Pembangunan Veteran Jawa Timur. Makna Bela Negara adala Bela Negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada Negara Kesatuan republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Adapaun nilai-nilai Bela Negara secara spesifik adalah:

1. Cinta Tanah Air Republik Indonesia.
2. Kesadaran berbangsa dan bernegara.
3. Meyakini kebenaran Pancasila sebagai falsafah dan ideologi negara.
4. Rela berkorban bagi bangsa dan negara
5. Memiliki kemampuan awal Bela Negara

Selain itu, secara spesifik lulusan Program Studi Administrasi Publik memiliki kekhasan governansi publik yang menekankan pada nilai-nilai profesionalisme, inovatif, adaptif. Nilai-nilai tersebut membentuk lulusan yang memiliki keunikan sebagai pengelola dan inovator tata kelola publik berbasis digital yang berkarakter bela negara, yang mampu menjunjung tinggi etika digital serta memberikan pelayanan publik yang transparan, inklusif dan berkarakter bela negara.

1.2 Landasan Filosofi

Kurikulum Program Studi Administrasi Publik Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur disusun sebagai pedoman dalam proses pembelajaran untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, memahami secara teori dan mampu mengimplementasikan teori pada bidang Ilmu Administrasi Publik. Kurikulum ini disusun berdasarkan landasan filosofis sebagai berikut:

1. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang dilandasi nilai universal dan objektif dalam mencapai kebenaran ilmiah;
2. Penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi yang dilandasi keimanan, kebebasan, dan tanggung jawab akademik serta sesanti Widya Mwat Yasa; dan
3. Peningkatan tata kelola UPN "Veteran" Jawa Timur yang baik dibuktikan dengan melaksanakan manajemen mandiri, modern, dan berkelanjutan.

1.3 Landasan Historis

Keberadaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik diawali dengan berdirinya Fakultas Ilmu Administrasi yang teridiri dari Jurusan Administrasi Negara dan Administrasi Niaga. Satu tahun kemudian Fakultas Ilmu Administrasi membuka satu jurusan baru yaitu jurusan

Ilmu Komunikasi pada tahun ajaran 1994/1995. Dalam perkembangan selanjutnya terbit Surat Keputusan Rektor UPN "Veteran" Jawa Timur Nomor: Skep/101/IX/2005 tanggal 6 Mei 2005 tentang Pergantian nama Fakultas Ilmu Administrasi UPN "Veteran" Jawa Timur menjadi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Selanjutnya status UPN "Veteran" Jawa Timur yang semula berstatus sebagai Perguruan Tinggi kedinasan berubah menjadi Perguruan Tinggi Swasta dibawah KopertisWilayah VII sesuai dengan Surat Keputusan Bersama antara Menhankam dengan Mendikbud nomor: 0307/0/1994/KEP/10/XI/1994 Tanggal 29 Nopember 1995 tentang Peningkatan Pengabdian UPN "Veteran" melalui Pelaksanaan Keterkaitan dan Keterpaduan. Sejak tahun 2009 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik memiliki empat Program Studi yaitu:

1. Ilmu Administrasi Negara
2. Ilmu Administrasi Bisnis
3. Ilmu Komunikasi
4. Hubungan Internasional

Selanjutnya UPN "Veteran" Jawa timur berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur sebagai Perguruan Tinggi Negeri. Kemudian pada tahun 2015 mulai penerimaan mahasiswa baru sebagai PTN. Pada tahun 2020 bertambah satuProgram Studi Pariwisata, sehingga menjadi 5 Program studi.

1. Administrasi Publik
2. Administrasi Bisnis
3. Ilmu Komunikasi
4. Hubungan Internasional
5. Pariwisata

Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UPN "Veteran" Jawa Timur (FISIP-UPNVJT) diselenggarakan berdasarkan keputusan Rektor 92/ UN63/KP/2020 tentang perubahan nama Program Studi Administrasi Publik. Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UPN "Veteran" Jawa Timur terakreditasi "**UNGGUL**" berdasarkan Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor : 2615/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IV/2020 sampai pada tanggal 21 April 2025 dan terakreditas internasional FIBAA (*Foundation for International Business Administration Accreditation*) sampai pada tanggal 26 November 2026.

1.4 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586).

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 tahun 2018, tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi.
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 123 Tahun 2019 tentang Magang dan Pengakuan Satuan Kredit Semester Magang Industri untuk Program Sarjana dan Sarjana Terapan.
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020, Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin PTS.
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020, tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
14. Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Nomor 9 tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Sarjana (S-1) Universitas Pembangunan Nasional “Veteran Jawa Timur.
15. Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Nomor 25 tahun 2023 tentang Peraturan Akademik Untuk Program Pendidikan Program Sarjana dan Sarjana Terapan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
16. Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Nomor: KEP/155/UN.63/2019, tentang Standar Pendidikan Tinggi Bidang Akademik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

17. Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Nomor: 89/UN.63/U/2020, tentang Implementasi Pembelajaran Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

II. VISI, MISI, DAN TUJUAN PENDIDIKAN

2.1 Visi dan Misi Fakultas

Visi: Menjadi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unggul Berkarakter Bela Negara

Misi:

1. Menyelanggarakan dan mengembangkan pendidikan bidang ilmu sosial dan ilmu politik yang berkarakter bela negara;
2. Meningkatkan budaya riset dalam pengembangan ilmu sosial dan ilmu politik yang berdayaguna untuk peningkatkan kesejahteraan masyarakat;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan kearifanlokal;
4. Menyelenggaraan tata kelola yang bersih dalam rangka mencapai akuntabilitas pengelolaaan anggaran di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;
5. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia unggul dalam sikap dan tata nilai, unjuk kerja, penguasaan pengetahuan, dan manajerial yang relevan dengan bidang ilmu sosial dan ilmu politik;
6. Meningkatkan sistem pengelolaan sarana dan prasarana terpadu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;
7. Meningkatkan kerjasama institusional dengan stakeholders baik dalam dan luar negeri.

Tujuan:

1. Mengimplementasikan kurikulum program studi Ilmu Administrasi Negara, Ilmu Administrasi Bisnis, ilmu komunikasi, dan hubungan internasional serta layanan pendidikan yang relevan dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) berbasis bela negara;
2. Meningkatkan mutu inovasi riset dalam pengembangan ilmu sosial dan ilmu politik yang berdaya guna untuk peningkatkan kesejahteraan masyarakat;
3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan kearifan lokal;
4. Melaksanakan penyelenggaraan tata kelola yang bersih dalam rangka mencapai akuntabilitas pengelolaaan anggaran di fakultas dan program studi;
5. Mewujudkan sumber daya manusia unggul dibidang ilmu sosial dan ilmu politik yang kompeten dan berdaya saing tinggi;
6. Mewujudkan sarana dan prasarana yang memadai dengan pengelolaan yang efektifdan efisien di fakultas dan program studi;
7. Mewujudkan kerjasama institusional dengan stakeholder baik dalam maupun luar negeri yang intensif dan menguntungkan kedua belah pihak.

2.2. Visi dan Misi Program Studi

a. Visi Program Studi

Menjadi Program Studi Administrasi Publik Unggul Dalam Governansi Publik Berkarakter Bela Negara pada Tahun 2030

b. Misi Program Studi

1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan administrasi publik pada bidang kebijakan serta manajemen publik yang berkarakter bela negara dengan menanamkan etika, integritas, dan profesionalisme.
2. Meningkatkan budaya riset dalam pengembangan administrasi publik yang berdayaguna untuk peningkatkan kesejahteraan masyarakat;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan kearifan lokal;
4. Meningkatkan kerjasama dengan *stakeholders* baik dalam dan luar negeri dalam implementasi Tri Dharma

c. Tujuan Program Studi

1. Menghasilkan lulusan administrasi publik pada yang unggul di bidang kebijakan publik dan manajemen publik dengan menjunjung tinggi bela negara, etika, integritas, dan profesionalisme.
2. Mewujudkan lulusan yang mampu melakukan tata kelola publik di tingkat lokal melalui pengabdian yang akuntabel berbasis riset.
3. Membentuk lulusan yang mampu menghasilkan karya penelitian inovatif di bidang kebijakan dan manajemen publik yang berbasis pada pemecahan masalah (*problem-solving*), berdaya guna bagi masyarakat.
4. Menghasilkan lulusan yang mampu menerapkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik.
5. Menghasilkan lulusan yang mampu membangun kolaborasi strategis dan menjadi mitra dalam pengembangan tata kelola publik di tingkat nasional maupun internasional.

2.3 Tujuan Pendidikan Program Studi (TPP)

Tabel 2.1 Tujuan Pendidikan Program Studi (TPP)

No	Kode Tujuan Pend. Prodi	Deskripsi Tujuan Pendidikan Prodi
1	TPP-1 Analis Kebijakan Publik Berbasis Bukti Dan Berkarakter Bela Negara	Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan sebagai analis kebijakan publik yang berbasis data (*evidence* based), analitis untuk memecahkan permasalahan organisasi publik yang dibekali nilai bela negara, etika, integritas, dan profesionalisme sebagai fondasi dalam menjalankan peran strategis di bidang administrasi publik.
2	TPP-2 Pelaksana Pelayanan Dan Urusan Publik Yang Profesional Dan Responsif	Menghasilkan lulusan yang mampu mengimplementasikan tata kelola publik dan mengorganisasikan kegiatan pelayanan publik secara profesional, responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
3	TPP-3. Peneliti Sektor Publik	Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan dasar dalam hal metodologi penelitian yang tepat untuk mengidentifikasi fonomena sektor publik untuk mendukung pengambilan keputusan publik.
4	TPP-4 Birokrat /Administrator Publik/ Manajer Sektor Publik yang Akuntabel dan Inovatif	Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan dalam memimpin dan mengelola organisasi sector publik (pemerintah, swasta, dan nirlaba) dengan menjunjung tinggi etika dan akuntabilitas.

III. EVALUASI KURIKULUM & TRACER STUDY

3.1. Evaluasi Kurikulum

Kurikulum Program Studi Administrasi Publik Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur adalah kurikulum tahun 2023. Evaluasi kurikulum pada program studi Administrasi Publik UPN "Veteran" Jawa Timur merupakan suatu proses yang perlu dilakukan secara berkesinambungan untuk menjawab kebutuhan dimasa mendatang utamanya yang berorientasi Kerangka Kualifikasi Nasional (KKNI), Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dan *Outcame Based Education* (OBE).Hal ini dilakukan sebagai upaya penjaminan mutu dalam menghasilakan lulusan yang kompetitif.

Program Studi Administrasi Publik melakukan evaluasi kurikulum melalui cara: *Focus Group Discussion* (FGD) yang mengundang alumni, pengguna lulusan atau alumni dari sektor pemerintahan, swasta, *Non Government Organization* (NGO), stakholder yang menjadi mitra; melakukan *benchmarking* terhadap sesama program studi sejenis; melakukan penyesuaian dengan ketetapan asosiasi program studi dalam hal ini adalah *Indonesian Association for Public Administration* (IAPA); melakukan diskusi non formal dengan mngundang mahasiswa, alumni yang sedang studi lanjut S2 serta alumni yang sudah bekerja terkait kompetensi yang dibutuhkan di dunia kerja.

Dari proses tersebut terdapat beberapa point penting yang dapat dijadikan dasar dalam penyusunan kurikulum diantaranya adalah terpenuhinya kebutuhan atau tuntutan dunia kerja yang profesional; pengembangan capaian pembelajaran yang dapat merespon dinamika di masyarakat dan perkembangan iptek. Berdasarkan hasil tersebut dapat dijadikan dasar bagi Prodi Admnistrasi Publik melakukan evaluasi kurikulum dan dijadikan dasar dalam penyusunan kurikulum Prodi Administrasi Prodi.

Mekanisme peninjauan kurikulum yang dilakukan oleh Prodi Administrasi Publik adalah sebagai berikut:

1) melakukan evaluasi dan menganalisis terhadap kompetensi mahasiswa dan kebutuhan pengguna lulusan;
2) membentuk tim peninjau kurikulum Prodi Administrasi Publik;
3) Prodi melakukan rapat bersama dengan tim peninjau kurikulum, Tim Gugus Penjamin Mutu (GPM) Prodi untuk merumuskan redesain kurukulum dengan mempertimbangkan visi misi prodi serta kebutuhan *stake holder*;
4) Tim peninjau kurikulum melakukan konsultasi dengan pihak fakultas terkait draft redesain kurikulum tersebut sebelum digunakan sebagai bahan lokakarya peninjauan kurikulum;
5) Tim kurikulum melaksanakan lokakarya dalam rangka pembahasan redesain kurikulum dengan mengundang dosen, tenaga kependidikan, perwakilan mahasiswa, alumni serta

pengguna lulusan dan hasil lokakarya ini digunakan sebagai dasar untuk menyusun serta merumuskan kurikulum baru;

6) Draft kurikulum baru Prodi Administrasi Publik yang telah dirumuskan diajukan ke pihak Fakultas untuk disetujui dan disahkan oleh Dekan melalui Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Berdasarkan hasil lokakarya peninjauan kurikulum yang telah dilakukan oleh Prodi Administrasi Publik akhirnya disepakati bahwa pembaharuan kurikulum berdasarkan umpan balik prodi terhadap masukan dari stake holder, alumni dan pengguna lulusan; penyesuaian mata kuliah wajib program studi dengan matakuliah wajib asosiasi *Indonesian Association for Public Administration* (IAPA); serta struktur dan isi kurikulum di evaluasi untuk disesuaikan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sejalan dengan tuntutan dan kebutuhan pemangku kepentingan.

3.2. Tracer Study

Tracer study adalah salah satu metode yang digunakan untuk palacakan alumni dan untuk mendapatkan umpan balik dari alumni. Tracer study yang dilakukan oleh Prodi Administrasi Publik UPN "Veteran" Jawa Timur kepada para alumninya setelah 6 bulan lulus dari perguruan tinggi. *Tracer Study* bermanfaat untuk menyediakan berbagai informasi bagi kepentingan evaluasi hasil pendidikan tinggi dan selanjutnya dapat digunakan untuk penyempurnaan dan penjaminan kualitas. Selain itu, *Tracer Study* juga bermanfaat dalam menyediakan informasi penting mengenai hubungan antara pendidikan tinggi dan dunia kerja professional, menilai relevansi pendidikan tinggi, informasi bagi pemangku kepentingan (*stakeholders*), dan kelengkapan persyaratan bagi akreditasi pendidikan tinggi.

Tracer Study bertujuan untuk mengetahui hasil pendidikan dalam bentuk transisi dari dunia pendidikan tinggi ke dunia usaha dan industri, keluaran pendidikan berupa penilaian diri terhadap penguasaan dan pemerolehan kompetensi, proses pendidikan berupa evaluasi proses pembelajaran dan kontribusi pendidikan tinggi terhadap pemerolehan kompetensi serta input pendidikan berupa penggalian lebih lanjut terhadap informasi lulusan.

Bagi Prodi Administrasi Publik UPN "Veteran" Jatim, *tracer study* memiliki beberapa tujuan antara lain:

a) mengetahui keberadaan alumni setelah lulus kuliah.
b) membangun data base alumni.
c) mengidentifikasi profil kompetensi alumni.
d) mengetahui relevansi pelaksanaan kurikulum dengan kebutuhan pasar kerja.

IV. PROFIL LULUSAN DAN RUMUSAN CAPAIAN PEMBELAJARAN

4.1 Profil Lulusan

Profil lulusan program studi menggambarkan jenis profesi, bidang jenis pekerjaan atau bentuk kerja yang dapat dijalani oleh lulusan Program Studi Administrasi Publik sesuai dengan kompetensi yang diperoleh sesuai dengan proses pembelajaran di program studi Administrasi Publik. Tujuan pendidikan prodi tentunya untuk mempersiapkan lulusan yang mampu menerapkan keilmuan dan pengalaman yang didapat dari program studi sesuai dengan profesinya masing-masing.

Tabel 4.1 Profil Lulusan dan Deskripsinya

No	Profil Lulusan (PL)	Deskripsi Profil Lulusan
1	PL-1. Analis Kebijakan	Mampu mengidentifikasi dan menganalisis masalah publik serta menyusun rekomendasi kebijakan tingkat pemula secara sistematis dengan memanfaatkan teknologi informasi.
2	PL-2 Pelaksana urusan publik	Menjadi pelaksana kegiatan, berupa pelayanan publik dan pembangunan, atau government relations berbasis digital, pada organisasi pemerintah, swasta, nirlaba, atau badan usaha milik pemerintah yang mengelola kepentingan publik.
3	PL-3 Administrator/ Manajer Sektor Publik	Memiliki kemampuan dalam memimpin dan mengelola organisasi pemerintah, swasta, nirlaba, atau badan usaha milik pemerintah; mampu menerapkan fungsi manajerial baik pada ditingkat operasional maupun Tingkat manajer terutama pada urusan publik.
4	PL-4 Peneliti sektor Publik	Menjadi peneliti tingkat pemula dalam bidang Administrasi Publik dalam ruang lingkup dan kompleksitas tertentu dengan menggunakan metode dan kaidah ilmiah

Tabel 4.2 Matrik Korelasi Profil Lulusan dan Tujuan Pendidikan Prodi

No	Profil Lulusan (PL)	Tujuan Pendidikan Prodi (TPP)			
		TPP-1	TPP-2	TPP-3	TPP-4
1	PL-1. Analis Kebijakan	√		√	
2	PL-2 Pelaksana urusan publik		√		√
3	PL-3 Administrator/ Manajer Sektor Publik	√	√	√	√

4	PL-4 Peneliti sektor Publik	√		√	

4.2 Rumusan Capaian Pembelajaran (CPL)

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) merupakan rumusan kompetensi yang harus dimilik oleh setiap lulusan setelah menyelesaikan seluruh proses pembelajaran di Program Studi Administrasi Publik UPN"Veteran" Jawa Timur. CPL disusun mengacu pada Permendikbud No 3 Tahun 2020 yang menggantikan SN Dikti Permenristekdikti No 44 tahun 2015 dan Lampiran Capaian Pembelajaran Prodi Administrasi Publik oleh Himpunan Lembaga Pendidikan Tinggi Indonesian Asscociation of Public Administration (IAPA), maka perlu dilakukan analisa kesesuaian CPL. Rumusan CPL OBE tidak lagi memisahkan capian pembelajaran dari sikap, keterampilan umum, pengetahuan dan keterampilan khusus. Rumusan setiap CPL OBE mengandung kombinasi dari unsur sikap, keterampilan umum, pengetahuan dan keterampilan khusus. Hal tersebut bertujuan agar CPL yang dirumuskan dapat lebih terukur dalam pencapaiannya oleh mahasiswa. CPL OBE hasil dari reformulasi CPL lama dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut.

Tabel 4.3. Capaian Pembelajaran (CPL) Prodi Administrasi Publik

Kode	Deskripsi Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)
CPL-1	Mampu menunjukkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung nilai kemanusiaan, serta menginternalisasi etika akademik. Berperan sebagai warga negara yang taat hukum, nasionalis, bertanggung jawab, menghargai keberagaman, dan berkontribusi dalam kehidupan berbangsa berlandaskan Pancasila dan bela negara.
CPL-2	Mampu menguasai konsep dan prinsip pengorganisasian kegiatan pelayanan publik dan pembangunan diberbagai organisasi baik pemerintah, swasta, nirlaba, maupun BUMN, dengan integritas tinggi, tanggung jawab, kemandirian, kewirausahaan, dan profesionalitas.
CPL-3	Menguasai konsep dasar teori administrasi, politik, birokrasi, governansi publik, kebijakan dan pelayanan publik, perilaku organisasi, keuangan negara, reformasi administrasi, serta prinsip administrasi publik, manajemen publik, teori organisasi, manajemen SDM sektor publik, keuangan publik, kepemimpinan, dan pengambilan keputusan.
CPL-4	Menguasai konsep dan metode penelitian administrasi serta kebijakan publik dengan pendekatan inovatif untuk menganalisis data, menyelesaikan masalah di bidang keahlian melalui kajian ilmiah yang disusun dalam skripsi atau laporan tugas akhir berdasarkan analisis data dan informasi, serta sesuai dengan kaidah ilmiah dan statistik
CPL-5	Mampu memimpin dan mengelola organisasi sektor publik, sektor swasta, dan sektor nirlaba dengan logis, kritis, sistematis, inovatif, menguasai komunikasi persuasif lisan maupun tulisan, serta menunjukkan kinerja mandiri yang berintegritas dan berlandaskan nilai-nilai humaniora, dengan memanfaatkan teknologi digital sesuai bidang keahliannya

CPL-6	Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja, mengolah informasi untuk menyusun analisis dan rekomendasi kebijakan, bertanggung jawab atas kinerja dan evaluasi tugas kelompok kerja dalam ruang lingkup administrasi publik, mengidentifikasi dan menganalisis interaksi antaraktor dalam penerapan manajemen pelayanan publik di tingkat lokal maupun nasional.
CPL-7	Menguasai konsep dasar kebijakan publik dan analisis kebijakan publik dengan beragam metode dan alat, Mampu mengolah informasi sebagai pendukung penyusunan rekomendasi kebijakan, dan Mampu menyusun analisis kebijakan dalam ruang lingkup dan kompleksitas yang tertentu.
CPL-8	Mampu mengorganisasikan, merencanakan, menyusun, anggaran, mengalokasikan sumber daya, implementasi dan evaluasi kegiatan dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan publik.
CPL-9	Mampu mengkaji regulasi yang relevan serta menyusun hasil analisis untuk merancang dan meningkatkan manajemen organisasi serta pelayanan publik yang efisien dan responsif serta berintegritas.

4.3 Matrik Hubungan CPL dengan Profil Lulusan

Tabel 4.4 Matrik Hubungan CPL dengan Profil Lulusan

Kode	Deskripsi CPL Prodi	PL1	PL2	PL3	PL4
CPL-1	Mampu menunjukkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung nilai kemanusiaan, serta menginternalisasi etika akademik. Berperan sebagai warga negara yang taat hukum, nasionalis, bertanggung jawab, menghargai keberagaman, dan berkontribusi dalam kehidupan berbangsa berlandaskan Pancasila dan bela negara.	√	√	√	√
CPL-2	Mampu menguasai konsep dan prinsip pengorganisasian kegiatan pelayanan publik dan pembangunan diberbagai organisasi baik pemerintah, swasta, nirlaba, maupun BUMN, dengan integritas tinggi, tanggung jawab, kemandirian, kewirausahaan, dan profesionalitas.	-	√	√	√
CPL-3	Menguasai konsep dasar teori administrasi, politik, birokrasi, governansi publik, kebijakan dan pelayanan publik, perilaku organisasi, keuangan negara, reformasi administrasi, serta prinsip administrasi publik,	√	√	√	√

	manajemen publik, teori organisasi, manajemen SDM sektor publik, keuangan publik, kepemimpinan, dan pengambilan keputusan.				
CPL-4	Menguasai konsep dan metode penelitian administrasi serta kebijakan publik dengan pendekatan inovatif untuk menganalisis data, menyelesaikan masalah di bidang keahlian melalui kajian ilmiah yang disusun dalam skripsi atau laporan tugas akhir berdasarkan analisis data dan informasi, serta sesuai dengan kaidah ilmiah dan statistik	√	-	-	√
CPL-5	Mampu memimpin dan mengelola organisasi sektor publik, sektor swasta, dan sektor nirlaba dengan logis, kritis, sistematis, inovatif, menguasai komunikasi persuasif lisan maupun tulisan, serta menunjukkan kinerja mandiri yang berintegritas dan berlandaskan nilai-nilai humaniora, dengan memanfaatkan teknologi digital sesuai bidang keahliannya	-	√	√	√
CPL-6	Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja, mengolah informasi untuk menyusun analisis dan rekomendasi kebijakan, bertanggung jawab atas kinerja dan evaluasi tugas kelompok kerja dalam ruang lingkup administrasi publik, mengidentifikasi dan menganalisis interaksi antaraktor dalam penerapan manajemen pelayanan publik di tingkat lokal maupun nasional.	√	√	√	√
CPL-7	Menguasai konsep dasar kebijakan publik dan analisis kebijakan publik dengan beragam metode dan alat, Mampu mengolah informasi sebagai pendukung penyusunan rekomendasi kebijakan, dan Mampu menyusun analisis kebijakan dalam ruang lingkup dan kompleksitas yang tertentu.	√	-	√	√
CPL-8	Mampu mengorganisasikan, merencanakan, menyusun, anggaran, mengalokasikan sumber daya, implementasi dan evaluasi kegiatan dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan publik.	√	√	√	-
CPL-9	Mampu mengkaji regulasi yang relevan serta menyusun hasil analisis untuk merancang dan meningkatkan manajemen organisasi serta pelayanan publik yang efisien dan responsif serta berintegritas.	√	√	√	-

Tabel 4.5. Matrik Hubungan CPL dengan Tujuan Pendidikan Prodi (TPP)

KODE	DESKRIPSI CPL PROGRAM STUDI	Tujuan Pendidikan Prodi (TPP)			
		TPP-1	TPP-2	TPP-3	TPP-4
CPL 1	Mampu menunjukkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung nilai kemanusiaan, serta menginternalisasi etika akademik. Berperan sebagai warga negara yang taat hukum, nasionalis, bertanggung jawab, menghargai keberagaman, dan berkontribusi dalam kehidupan berbangsa berlandaskan Pancasila dan bela negara.	√	√	√	√
CPL 2	Mampu menguasai konsep dan prinsip pengorganisasian kegiatan pelayanan publik dan pembangunan diberbagai organisasi baik pemerintah, swasta, nirlaba, maupun BUMN, dengan integritas tinggi, tanggung jawab, kemandirian, kewirausahaan, dan profesionalitas.	-	√		√
CPL 3	Menguasai konsep dasar teori administrasi, politik, birokrasi, governansi publik, kebijakan dan pelayanan publik, perilaku organisasi, keuangan negara, reformasi administrasi, serta prinsip administrasi publik, manajemen publik, teori organisasi, manajemen SDM sektor publik, keuangan publik, kepemimpinan, dan pengambilan keputusan		√	√	√
CPL 4	Menguasai konsep dan metode penelitian administrasi serta kebijakan publik dengan pendekatan inovatif untuk menganalisis data, menyelesaikan masalah di bidang keahlian melalui kajian ilmiah yang disusun dalam skripsi atau laporan tugas akhir berdasarkan analisis data dan informasi, serta sesuai dengan kaidah ilmiah dan statistik	√	-	√	√
CPL 5	Mampu memimpin dan mengelola organisasi sektor publik, sektor swasta, dan sektor nirlaba dengan logis, kritis, sistematis, inovatif, menguasai komunikasi persuasif lisan maupun tulisan, serta menunjukkan kinerja mandiri yang berintegritas dan berlandaskan nilai-nilai humaniora, dengan		√	-	√

	memanfaatkan teknologi digital sesuai bidang keahliannya				
CPL 6	Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja, mengolah informasi untuk menyusun analisis dan rekomendasi kebijakan, bertanggung jawab atas kinerja dan evaluasi tugas kelompok kerja dalam ruang lingkup administrasi publik, mengidentifikasi dan menganalisis interaksi antaraktor dalam penerapan manajemen pelayanan publik di tingkat lokal maupun nasional.	√	√	√	√
CPL 7	Menguasai konsep dasar kebijakan publik dan analisis kebijakan publik dengan beragam metode dan alat, Mampu mengolah informasi sebagai pendukung penyusunan rekomendasi kebijakan, dan Mampu menyusun analisis kebijakan dalam ruang lingkup dan kompleksitas yang tertentu.	√	-	√	-
CPL 8	Mampu mengorganisasikan, merencanakan, menyusun, anggaran, mengalokasikan sumber daya, implementasi dan evaluasi kegiatan dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan publik	√	√		√
CPL 9	Mampu mengkaji regulasi yang relevan serta menyusun hasil analisis untuk merancang dan meningkatkan manajemen organisasi serta pelayanan publik yang efisien dan responsif serta berintegritas	√	√	√	√

V. PENENTUAN BAHAN KAJIAN

5.1. Bahan Kajian

Bahan Kajian Program studi Administrasi Publik merupakan kumpulan bidang keilmuan yang menjadi pedoman atau landasan dalam penyelanggaraan pendidikan. Bahan kajian ini dirancang untuk membekali mahasiswa Prodi Administrasi Publik dengan pemahaman konseptual, kemampuan analitis, serta ketrampilan praktir dalam mengelola sektor publik secara transparan dan akuntabel. *Body of Knowledge* Administrasi Publik mencakup beberapa rumpun keilmuan : Kebijakan Publik, Manajemen Publik dan tata kelola sektor publik, pelayanan publik, administrasi dan pembangunan bekelanjutan, teori dan etika administrasi publik, metode penelitian , digital governance dan keuangan publik

Tabel 5.1. Bahan Kajian (BK)

No	Bahan Kajian	Mata Kuliah
1	BK 1. Kebijakan Publik	Kebijakan Publik. Analisis Kebijakan, Kebijakan Ketahanan Nasional, Komunikasi Dan Advokasi Kebijakan, Kebijakan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif, Kebijakan Demografi / Kependudukan, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan.
2	BK 2. Manajemen Publik dan Tata Kelola Sektor Publik	Manajemen Publik, Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik, Manajemen Aset, Manajemen Strategi Sektor Publik, Manajemen Konflik, Teori Organisasi, Azaz-azaz Manajemen, Reformasi Birokrasi.
3	BK 3. Pelayanan Publik	Manajemen Pelayanan Publik, Manajemen Perkantoran, Hubungan Masyarakat, Manajemen Resiko Bencana.
4	BK 4. Administrasi dan Pembangunan berkelanjutan	Administrasi Pembangunan, Perencaan Pembangunan, Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan, Administrasi Pemerintahan Daerah.
5	BK 5. Teori dan Etika Administrasi Publik	Teori Administrasi Negara, Teori Organisasi, Perilaku Organisasi, Pengantar Administrasi Negara, Sistem Addministrasi Negara, Ilmu Perbandingan, Sistem Politik Indonesia, Etika Administrasi Negara, Pendidikan Integritas & Anti Korupsi
6	BK 6. Metode Penelitian	Metode Penelitian Administrasi, Pengantar Statistik Sosial, Metode Penelitian Sosial, Seminar Isu-isu Administrasi Publik.
7	BK 7. Digital Governance dan Keuangan Publik	Governansi Digital, Birokrasi dan Governansi Publik, Keuangan Negara, Administrasi Perpajakan, Kebijakan Fiskal

5.2. Deskripsi Bahan Kajian

Tabel 5.2. Deskripsi Bahan Kajian (BK)

No	Bahan Kajian	Deskripsi Bahan Kajian
1	BK 1. Kebijakan Publik	Bahan kajian ini membahas proses dan dinamika kebijakan publik mulai dari identifikasi masalah, formulasi, implementasi, hingga evaluasi kebijakan. Mahasiswa dibekali kemampuan analisis kebijakan berbasis data serta pemahaman terhadap aktor dan lingkungan kebijakan
2	BK 2. Manajemen Publik dan Tata Kelola Sektor Publik	Bahan kajian ini berfokus pada pengelolaan organisasi sektor publik serta penerapan prinsip-prinsip *good Governance*
3	BK 3. Pelayanan Publik	Bahan kajian ini membahas dan menekankan pada konsep, standar, inovasi dan kualitas pelayanan publik sebagai bentuk utama interaksi pemerintah dengan masyarakat. Selain itu, mahasiswa juga dilatih untuk merancang dan mengevaluasi sistem pelayanan yang responsif dan berorientasi pada kepuasan publik.
4	BK 4. Administrasi dan Pembangunan berkelanjutan	Bahan kajian ini membahas peran administrasi publik dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan (*sustainable development*).
5	BK 5. Teori dan Etika Administrasi Publik	Bahan kajian ini memberikan landasan konseptual dan filosofis mengenai administrasi publik, termasuk perkembangan paradigma (klasik hingga *new public governance*) serta nilai-nilai etika, integritas, dan anti-korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
6	BK 6. Metode Penelitian	Bahan kajian ini membekali mahasiswa dengan kemampuan melakukan penelitian ilmiah dan analisis kebijakan berbasis data. Mencakup metode kuantitatif, kualitatif, serta penggunaan teknologi dalam pengolahan data.
7	BK 7. Digital Governance dan Keuangan Publik	Bahan kajian ini mengintegrasikan pengelolaan keuangan negara/daerah dengan pemanfaatan teknologi digital dalam tata kelola pemerintahan. Fokus pada transparansi fiskal, akuntabilitas, serta transformasi digital sektor publik.

VI. MATRIK CPL TERHADAP PEMBENTUKAN MATA KULIAH DAN PENENTUAN BOBOT SKS

Tabel 6.1 Matrik CPL Terhadap Pembentukan Mata Kuliah Dan Penentuan Bobot SKS

No	Nama Mata Kuliah	CPL									SKS
		CPL 1	CPL 2	CPL 3	CPL 4	CPL 5	CPL 6	CPL 7	CPL 8	CPL 9	
1	Agama	√					√				2
2	Pendidikan Pancasila	√				√	√				2
3	Bahasa Indonesia	√			√	√					2
4	Pengantar Ilmu Politik			√			√				2
5	Pengantar Statitsik Sosial				√			√			3
6	Ilmu Sosial Budaya Dasar	√				√					3
7	Pengantar Ilmu Administrasi Negara		√	√							3
8	Hukum Administrasi Negara	√								√	3
9	Kewarganegaraan	√				√					2
10	Bahasa Inggris	√				√	√				3
11	Azas-Azas Manajemen	√			√	√					3
12	Sistem Administrasi Negara			√			√				3
13	Teori Organisasi				√			√			3
14	Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik	√				√					3
15	Ilmu Perbandingan Adm Negara		√	√							3
16	Pendidikan Bela Negara	√				√	√				3
17	Metode Penelitian Sosial				√			√			3

18	Pengambilan Keputusan			√			√				3
19	Kebijakan Publik			√	√		√	√			3
20	Manajemen Pelayanan Publik		√	√				√		√	3
21	Governansi Digital				√	√					3
22	Keuangan Negara			√					√		3
23	Teori Administrasi Negara		√	√		√					3
24	Analisis Kebijakan	√								√	3
25	Metode Penelitian Administrasi				√		√	√			3
26	Birokrasi & Governansi Publik				√			√			3
27	Etika Administrasi Negara			√			√				3
28	Komunikasi & Advokasi Kebijakan			√	√		√	√			3
29	Perilaku Organisasi		√	√				√		√	3
30	Administrasi Pembangunan				√	√					3
31	Administrasi Perpajakan			√					√		3
32	Magang	√			√	√				√	2
33	Kewirausahaan		√			√					3
34	Kepemimpinan			√		√	√		√		2
35	Sistem Politik Indonesia	√		√			√				2
36	Manajemen Perkantoran		√			√				√	3
37	Administrasi Pemda		√			√					3
38	Perencanaan Pembangunan		√				√				3
39	Kuliah Kerja Nyata (Kkn)		√	√		√					2
40	Seminar Isu-Isu Administrasi Publik	√			√	√				√	3

41	Pengawasan & Pengendalian Pembangunan		√	√				√		√	3
42	Kebijakan Ketahanan Nasional		√	√							3
43	Reformasi Birokrasi	√								√	3
44	Ekonomi Politik			√			√	√			3
45	Manajemen Publik				√			√			3
46	Hubungan Masyarakat					√		√			2
47	Kebijakan Kependudukan/Demografi			√			√				2
48	Manajemen Aset			√			√				2
49	Manajemen Strategi Sektor Publik			√	√		√	√			2
50	Perubahan Sosial		√	√				√		√	2
51	Pendidikan Integritas & Anti Korupsi				√	√					2
52	Manajemen Resiko Bencana			√					√		2
53	Kebijakan Pariwisata & Ekonomi Kreatif		√	√				√		√	2
54	Kebijakan Fiskal				√	√					2
55	Administrasi BUMN/BUMD		√			√	√				2
56	Kebijakan Pembangunan Desa			√		√				√	2
57	Manajemen Konflik				√	√				√	2
58	Geopolitik dan SDA			√			√		√		3
59	Pemberdayaan Masyarakat					√			√		2
60	Implementasi dan evaluasi Kebijakan			√			√	√	√		2
61	Skripsi			√					√		6

VII. ORGANISASI MATA KULIAH PROGRAM STUDI

Tabel 7.1. Matrik Organisasi Mata Kuliah Prodi Administrasi Publik

No	SKS	Nama Mata Kuliah (MK)	MK Wajib Program Studi	MK Pilihan Program Studi	Pendidikan Umum (Moral, Etika, Sosial, Budaya, Lingkungan dan Manajemen) termasuk MKWUN
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	2	Agama Islam			√
		Agama Kristen			√
		Agama Katolik			√
		Agama Hindu			√
		Agama Budha			√
		Agama Kong Hucu			√
2	2	Pendidikan Pancasila			√
3	2	Kewarganegaraan			√
4	2	Bahasa Indonesia			√
5	3	Bahasa Inggris			√
6	3	Pendidikan Bela Negara			√
7	3	Kewirausahaan			√
8	2	Kepemimpinan			√
9	2	Kuliah Kerja Nyata (KKN)			√

10	3	Pengantar Ilmu Adm Negara	√		
11	3	Azas-Azas Manajemen	√		
12	3	Hukum Adm Negara	√		
13	3	Sistem Administrasi Negara	√		
14	3	Governansi Digital	√		
15	3	Teori Organisasi	√		
16	3	Kebijakan Publik	√		
17	3	Analisis Kebijakan	√		
18	3	Manajemen Publik	√		
19	3	Metode Penelitian Administrasi	√		
20	3	Pengambilan Keputusan	√		
21	3	Birokrasi & Governansi Publik	√		
22	3	Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik	√		
23	3	Etika Administrasi Negara	√		
24	3	Keuangan Negara	√		
25	3	Komunikasi & Advokasi Kebijakan	√		
26	3	Perilaku Organisasi	√		
27	3	Administrasi Pembangunan	√		
28	3	Seminar Isu-Isu Administrasi Publik	√		
29	2	Sistem Politik Indonesia	√		
30	3	Teori Adm Negara	√		

31	3	Manajemen Perkantoran	√		
32	3	Ilmu Perbandingan Adm Negara	√		
33	3	Perecanaan Pembangunan	√		
34	3	Pengawasan & Pengendalian Pembangunan	√		
35	3	Administrasi Perpajakan	√		
36	3	Administrasi Pemerintahan Daerah	√		
37	3	Reformasi Birokrasi	√		
38	3	Ekonomi Politik	√		
39	3	Kebijakan Ketahanan Nasional	√		
40	3	Manajemen Pelayanan Publik	√		
41	6	Skripsi	√		
42	3	Pengantar Statistik Sosial			√
43	3	Metode Penelitian Sosial			√
44	2	Pengantar Ilmu Politik			√
45	3	Ilmu Sosial Budaya Dasar			√
46	2	Magang			√
47	2	Hubungan Masyarakat	√		
48	2	Pendidikan Integritas & Anti Korupsi	√		
49	2	Kebijakan Kependudukan / Demografi	√		
50	2	Kebijakan Pariwisata & Ekonomi Kreatif	√		
51	2	Kebijakan Fiskal	√		

52	2	Kebijakan Pembangunan Desa	√		
53	2	Manajemen Aset	√		
54	2	Manajemen Konflik	√		
55	2	Manajemen Strategi Sektor Publik	√		
56	2	Administrasi BUMN/BUMD	√		
57	2	Manajemen Resiko Bencana	√		
58	2	Pemberdayaan Masyarakat	√		
59	2	Perubahan Sosial	√		
60	2	Implementasi & Evaluasi Kebijakan	√		
61	2	Geopilitik Dan Sumber Daya Alam	√		

Tabel 7.2. Organisasi Mata Kuliah Berdasar Kompetensi Umum (Penciri Nasional)

No	KODE MK	MATA KULIAH	SKS	KET
1.	UV21001	Agama Islam	2	Wajib
	UV21002	Agama Kristen		Wajib
	UV21003	Agama Katolik		Wajib
	UV21004	Agama Hindu		Wajib
	UV21005	Agama Budha		Wajib
	UV21006	Agama Kong Hucu		Wajib
2	UV21007	Pendidikan Pancasila	2	Wajib
3	UV21008	Kewarganegaraan	2	Wajib
4	UV21009	Bahasa Indonesia	2	Wajib
		TOTAL	**8**	

Tabel 7.3. Organisasi Mata Kuliah Berdasar Kompetensi Khusus (Penciri Institusi/ Universitas)

No	KODE MK	MATA KULIAH	SKS	KET
1	UV21010	Bahasa Inggris	3	Wajib
2	UV21011	Pendidikan Bela Negara	3	Wajib
3	UV21012	Kewirausahaan	3	Wajib
4	UV21013	Kepemimpinan	2	Wajib
5	UV21014	Kuliah Kerja Nyata (Kkn)	2	Wajib
		TOTAL	**13**	

Tabel 7.4. Organisasi Mata Kuliah Berdasar Kompetensi Khusus (Penciri Institusi/ Fakultas)

No	KODE MK	MATA KULIAH	SKS	KET
1	FS21001	Pengantar Statistik Sosial	3	Wajib
2	FS21002	Metode Penelitian Sosial	3	Wajib
3	FS21003	Pengantar Ilmu Politik	2	Wajib
4	FS21004	Ilmu Sosial Budaya Dasar	3	Wajib
5	FS21005	Magang	2	Wajib
		TOTAL	**13**	

Tabel 7.5. Organisasi Mata Kuliah Berdasar Kompetensi Utama (Penciri Program Studi)

No	KODE MK	MATA KULIAH	SKS	KET
1	AP21001	Pengantar Ilmu Adm Negara	3	Wajib
2	AP21002	Azas-Azas Manajemen	3	Wajib
3	AP21003	Hukum Adm Negara	3	Wajib
4	AP21004	Sistem Administrasi Negara	3	Wajib
5	AP21005	Governansi Digital	3	Wajib
6	AP21006	Teori Organisasi	3	Wajib
7	AP21007	Kebijakan Publik	3	Wajib
8	AP21008	Analisis Kebijakan	3	Wajib
9	AP21009	Manajemen Publik	3	Wajib
10	AP21010	Metode Penelitian Administrasi	3	Wajib
11	AP21011	Pengambilan Keputusan	3	Wajib
12	AP21012	Birokrasi & Governansi Publik	3	Wajib
13	AP21013	Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik	3	Wajib
14	AP21014	Etika Administrasi Negara	3	Wajib
15	AP21015	Keuangan Negara	3	Wajib
16	AP21016	Komunikasi & Advokasi Kebijakan	3	Wajib
17	AP21017	Perilaku Organisasi	3	Wajib
18	AP21018	Administrasi Pembangunan	3	Wajib
19	AP21019	Seminar Isu-Isu Administrasi Publik	3	Wajib
20	AP21020	Sistem Politik Indonesia	2	Wajib
21	AP21021	Teori Adm Negara	3	Wajib
22	AP21022	Manajemen Perkantoran	3	Wajib
23	AP21023	Ilmu Perbandingan Adm Negara	3	Wajib
24	AP21024	Perecanaan Pembangunan	3	Wajib
25	AP21025	Pengawasan & Pengendalian Pembangunan	3	Wajib
26	AP21026	Administrasi Perpajakan	3	Wajib
27	AP21027	Administrasi Pemerintahan Daerah	3	Wajib
28	AP21028	Reformasi Birokrasi	3	Wajib
29	AP21029	Ekonomi Politik	3	Wajib
30	AP21047	Kebijakan Ketahanan Nasional	3	Wajib

31	AP21049	Manajemen Pelayanan Publik	3	Wajib
32	AP21030	Skripsi	6	Wajib
TOTAL			98	

7.6. Organisasi Mata Kuliah Berdasar Kompetensi Pendukung (Pilihan Program Studi)

No	KODE MK	MATA KULIAH	SKS	KET
1	AP21031	Hubungan Masyarakat	2	Pilihan
2	AP21033	Pendidikan Integritas & Anti Korupsi	2	Pilihan
3	AP21033	Kebijakan Kependudukan / Demografi	2	Pilihan
4	AP21034	Kebijakan Pariwisata & Ekonomi Kreatif	2	Pilihan
5	AP21035	Kebijakan Fiskal	2	Pilihan
6	AP21036	Kebijakan Pembangunan Desa	2	Pilihan
7	AP21037	Manajemen Aset	2	Pilihan
8	AP21038	Manajemen Konflik	2	Pilihan
9	AP21039	Manajemen Strategi Sektor Publik	2	Pilihan
10	AP21040	Administrasi BUMN / BUMD	2	Pilihan
11	AP21047	Manajemen Resiko Bencana	2	Pilihan
12	AP21042	Pemberdayaan Masyarakat	2	Pilihan
13	AP21041	Perubahan Sosial	2	Pilihan
14	AP21044	Implementasi & Evaluasi Kebijakan	2	Pilihan
15	AP21046	Geopilitik Dan Sumber Daya Alam	2	Pilihan
		TOTAL	**30**	

Keterangan:

Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik dinyatakan **LULUS** jika telah menyelesaikan SKS minimun **144 SKS**, yang meliputi:

1	Kompetensi Umum (Penciri Nasional)	8	SKS
2	Kompetensi Khusus (Penciri Institusi/Fakultas)	13	SKS
3	Kompetensi Khusus (Penciri Institusi/Universitas)	13	SKS
4	Kompetensi Utama (Penciri Program Studi)	98	SKS
5	Kompetensi Pendukung (Pilihan Program StudiI)	12	SKS
	TOTAL	**144**	**SKS**

VIII. DAFTAR SEBARAN MATA KULIAH TIAP SEMESTER

Sebaran Mata kuliah pada setiap semester adalah sebagai berikut:

Semester I

No	KODE MK	MATA KULIAH	SKS	PRASYARAT
1.	UV21001	Agama Islam	2	
	UV21002	Agama Kristen		
	UV21003	Agama Katolik		
	UV21004	Agama Hindu		
	UV21005	Agama Budha		
	UV21006	Agama Kong Hucu		
2.	UV21007	Pendidikan Pancasila	2	
3.	UV21009	Bahasa Indonesia	2	
4.	FS21003	Pengantar Ilmu Politik	2	
5.	FS21001	Pengantar Statistik Sosial	3	
6.	FS21004	Ilmu Sosial Budaya Dasar	3	
7.	AP21001	Pengantar Ilmu Adm Negara	3	
8.	AP21003	Hukum Adm Negara	3	
TOTAL SKS SEMESTER 1			**20**	

Semester II

No	KODE MK	MATA KULIAH	SKS	PRASYARAT
1.	UV21008	Kewarganegaraan	2	UV21007
2.	UV21010	Bahasa Inggris	3	
3.	AP21002	Azas-Azas Manajemen	3	
4.	AP21004	Sistem Administrasi Negara	3	
5.	AP21006	Teori Organisasi	3	
6.	AP21013	Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik	3	
7.	AP21023	Ilmu Perbandingan Adm Negara	3	AP21001
TOTAL SKS SEMESTER 2			**20**	

Semester III

No	KODE MK	MATA KULIAH	SKS	PRASYARAT
1.	UV21011	Pendidikan Bela Negara	3	UV21008
2.	FS21002	Metode Penelitian Sosial	3	FS21001
3.	AP21005	Governansi Digital	3	
4.	AP21007	Kebijakan Publik	3	
5.	MKB4175	Manajemen Pelayanan Publik	3	
6.	AP21011	Pengambilan Keputusan	3	
7.	AP21022	Keuangan Negara	3	
8.	AP21021	Teori Adm Negara	3	AP21001
TOTAL SKS SEMESTER 3			**24**	

Semester IV

No	KODE MK	MATA KULIAH	SKS	PRASYARAT
1.	AP21008	Analisis Kebijakan	3	AP21007
2.	AP21010	Metode Penelitian Administrasi	3	FS21002
3.	AP21012	Birokrasi & Governansi Publik	3	
4.	AP21014	Etika Administrasi Negara	3	
5.	AP21016	Komunikasi & Advokasi Kebijakan	3	
6.	AP21017	Perilaku Organisasi	3	
7.	AP21018	Administrasi Pembangunan	3	
8.	AP21026	Administrasi Perpajakan	3	
TOTAL SKS SEMESTER 4			**24**	

Semester V

No	KODE MK	MATA KULIAH	SKS	PRASYARAT
1.	FS21005	Magang	2	FS21002
2.	AP21020	Sistem Politik Indonesia	2	
3.	UV21012	Kewirausahaan	3	
4.	UV21013	Kepemimpinan	2	
5.	AP21014	Manajemen Perkantoran	3	
6.	AP21024	Perencanaan Pembangunan	3	
7.	AP21027	Administrasi Pemerintahan Daerah	3	
TOTAL SKS MK WAJIB SEMESTER 5			**18**	
8.	AP21031	Hubungan Masyarakat	2	
9	AP21033	Kebijakan Kependudukan / Demografi	2	
TOTAL SKS MK PILIHAN SEMESTER 5			**4**	
TOTAL SKS SEMESTER 5			**22**	

Semester VI

No	KODE MK	MATA KULIAH	SKS	PRASYARAT
1.	UV21014	Kuliah Kerja Nyata (Kkn)	2	
2.	AP21019	Seminar Isu-Isu Administrasi Publik	3	AP21010
3.	AP21025	Pengawasan & Pengendalian Pembangunan	3	
4.	AP21047	Kebijakan Ketahanan Nasional	3	
5.	AP21028	Reformasi Birokrasi	3	
6.	AP21029	Ekonomi Politik	3	
7.	AP21009	Manajemen Publik	3	
TOTAL SKS MK WAJIB SEMESTER 6			**20**	
1	AP21037	Manajemen Aset	2	
2	AP21039	Manajemen Strategi Sektor Publik	2	
3	AP21045	Perubahan Sosial	2	
4	AP21032	Pendidikan Integritas & Anti Korupsi	2	
5	AP21041	Manajemen Resiko Bencana	2	
6	AP21034	Kebijakan Pariwisata & Ekonomi Kreatif	2	
7	AP21035	Kebijakan Fiskal	2	
TOTAL SKS MK PILIHAN SEMESTER 6			**2**	
TOTAL SKS SEMESTER 6			**22**	

Semester VII

No	KODE MK	MATA KULIAH	SKS	PRASYARAT
1.	AP21040	Administrasi Bumn/Bumd	2	
2.	AP21036	Kebijakan Pembangunan Desa	2	
3.	AP21051	Geopolitik Dan Sumber Daya Alam	2	
4	AP21038	Manajemen Konflik	2	
5	AP21042	Pemberdayaan Masyarakat	2	
6	AP21044	Implementasi & Evaluasi Kebijakan	2	
TOTAL SKS MK PILIHAN SEMESTER 7			6	
TOTAL			**6**	

Semester VIII

No	KODE MK	MATA KULIAH	SKS	PRASYARAT
1.	AP21030	SKRIPSI	6	AP21010
				MAGANG
TOTAL SKS SEMESTER 8			**6**	

Catatan:

1. Mata Kuliah Wajib Umum Nasional (MKWUN) yaitu:
   a. Agama (2 sks);
   b. Pancasila (2 sks);
   c. Kewarganegaraan (2 sks);
   d. Bahasa Indonesia (2 sks).
2. MK Penciri UPN Veteran Jawa Timur, yaitu:
   a. Bahasa Inggris (3 sks),
   b. Bela Negara (3 sks)
   c. Kewirausahaan (3 sks)
   d. Kepemimpinan (2 sks)

IX. PENILAIAN HASIL BELAJAR

Penilaian hasil belajar mahasiswa Prodi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dna Ilmu Politik UPN "Veteran" Jawa Timur bertujuan untuk menguku pencapaian kompetensi pembelajaran yang ditetapkan, Penilaian hasil bejar mahasiswa mencakup aspek *hardskill* dan *softskill* yang dapat dilakukan dalam berbagai bentuk.

a) Untuk mengukur capaian pembelajaran mata kuliah dapat dilakukan melalui Ujian Tengah Semester, ujian Akhir Semester, Ujian Lisan, Tugas-Tugas, dan Portofolio.
b) Nilai evaluasi hasil pembelajaran mata kuliah dapat berasal dari nilai UTS, UAS, tugas-tugas dan praktikum (jika ada). Distribusi besaran nilai dari masing-masing unsur penilaian tersebut tergantung dosen pengampu mata kuliah dan atau hasil kesepakatan dosen dengan mahasiswa.
c) Sistem Penilaian di Prodi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik mengacu pada Peraturan Rektor UPN Veteran Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Peraturan Akademik. Penilaian hasil belajar dinyatakan dalam bentuk huruf : A, B, C, D, dan E.
d) Konversi nilai huruf dan bobot nilai huruf digunakan pedoman sebagai berikut :

NILAI ANGKA	NILAI HURUF	BOBOT NILAI
≥ 80 – 100	A	4,00
≥ 76 – < 80	A -	3,75
≥ 72 – < 76	B +	3,50
≥ 68 – < 72	B	3,00
≥ 64 – < 68	B -	2,75
≥ 58 – < 64	C +	2,50
≥ 56 – < 58	C	2,00
≥ 46 – < 56	C -	1,50
≥ 42 – < 46	D	1,00
0 – < 42	E	0,00

e) Mahasiswa dinyatakan lulus mata kuliah, apabila mendapat nilai minimal C. Mahasiwa yang dapat nilai D+, D, dan E wajib mengulang program pembelajaran dan ujian pada semester reguler.
f) Mahasiswa yang mendapat nilai C dapat melakukan perbaikan pada semester reguler, dan nilai yang dipakai adalah nilai yang terbaik.
g) Jika karena sesuatu hal nilai belum dapat ditentukan maka kepadanya diberikan nilai K yang berarti kurang lengkap dengan nilai bobot nol (0). Apabila sampai dengan pengisian KRS semester berikutnya nilai masih K, mahasiswa tersebut dianggap tidak lulus (E)

Prinsip Penilaian hasil belajar mahasiswa diselenggarakan dengan memegang teguh prinsip sebagai berikut:

1. Objektif: Penilaian didasarkan pada standar kemampuan yang disepakati, tanpa dipengaruhi subjektivitas penilai.
2. Akuntabel: Penilaian dilakukan sesuai prosedur dan kriteria yang jelas, dapat dipertanggungjawabkan.

3. Transparan: Prosedur, kriteria, dan dasar penilaian dapat diketahui oleh pihak yang relevan, terutama mahasiswa.
4. Otentik: Menilai kemampuan riil mahasiswa dalam konteks dunia nyata atau simulasi profesional.

X. PEMBELAJARAN MELALUI MBKM

Kampus merdeka merupakan program Kemendikbud yang bertujuan untuk menyiapkan mahasiswa siap menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi yang pesat. Kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MBKM) dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui regulasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Kebijakan MBKM yang berpusat pada mahasiswa ini menjadi penting khususnya di era industri 4.0 dimana dunia kerja banyak mengalami perubahan dengan pesat karena adanya disrupsi teknologi sebagai konsekuensi logis dari adanya Industri 4.0 (sistem siber-fisik). Lulusan perguruan tinggi harus mampu secara cerdas menggunakan teknologi internet of things yang menjadi landasan Industri 4.0 agar bisa menjadi bagian dari masyarakat informasi (4.0 society) dan masyarakat super cerdas (5.0 society). Penerapan teknologi internet of things dalam industri 4.0 akan menuntut jenis pekerjaan baru, sebagaimana dinyatakan dalam laporan World Economic Forum tahun 2020. Tuntutan bagi kompetensi lulusan menjadi sangat tinggi.Kondisi ini menyebabkan MBKM sangat dibutuhkan untuk memberi ruang gerak yang lebih cepat dan lebih lincah bagi mahasiswa untuk meningkatkan kompetensinya agar mampu berperan aktif ketika memasuki masyarakat 4.0 dan 5.0. Perguruan Tinggi dituntut untuk merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif dan adaptif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan (umum dan khusus) secara optimal, relevan untuk masa sekarang dan masa depan yang dekat (near future) dengan karakteristik industri 4.0. Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) diharapkan dapat menjadi jawaban atas tuntutan tersebut. Kampus Merdeka merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga terciptanya budaya belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan dan minat pengembangan diri dari mahasiswa. Guna mengimplementasikan kebijakan ini, UPNVJT melakukan transformasi pembelajaran untuk bisa membekali dan menyiapkan lulusannya agar menjadi generasi yang unggul, generasi yang tanggap dan siap menghadapi tantangan zamannya, tanpa meninggalkan nilai-nilai Bela Negara.

Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka bertujuan untuk: mengurangi kesenjangan antara kapasitas penyelenggaraan PT dengan tuntutan kualifikasi lulusan dengan menggunakan peran pemangku kepentingan di luar kampus yang yang lebih mumpuni melakukan itu. memberikan kebebasan yang lebih luas kepada mahasiswa dalam mempersiapkan dirinya memasuki dunia kerja pada era industri 4.0. memanfaatkan platform belajar pihak ketiga.

Dalam rangka memenuhi tuntutan, arus perubahan dan kebutuhan akan *link and match* dengan dunia usaha, dunia industri, serta untuk menyiapkan mahasiswa dalam dunia kerja dan pengembangan keilmuan, Perguruan Tinggi dituntut agar dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal. Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) diharapkan dapat menjadi jawaban

atas tuntutan tersebut. Kampus Merdeka merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga terciptanya budaya belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan dan minat pengembangan diri dari mahasiswa.

Bahwa kebijakan MBKM merupakan pembelajaran berpusat pada mahasiswa. Setiap mahasiswa mempunyai hak untuk memperkaya kompetensinya dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk yang bersangkutan memasuki dunia kerja. Sebagai bentuk implementasi MBKM, Prodi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UPNVJT memastikan bahwa dalam pelaksanaan MBKM harus sesuai dengan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) harus tetap dipenuhi. Oleh karena itu, mahasiswa yang mengikuti program MBKM tetap harus dalam bimbingan dosen, agar dapat menggunakan kebebasan yang disediakan dalam kebijakan MBKM secara bermakna dan berujung pada peningkatan kompetensi yang diharapkan oleh mahasiswa, namun tetap dalam koridor pemenuhan CPL PS yang diikutinya.

Prodi Administrasi Publik FISIP UPNVJT memfasilitasi mahasiswa untuk mengikuti kegiatan Merdeka belajar sebagai berikut:

a) Mahasiswa program sarjana/sarjana terapan mengikuti seluruh proses Pembelajaran dalam Program Studi pada Perguruan Tinggi sesuai masa dan beban belajar; atau
b) mengikuti proses Pembelajaran di dalam Program Studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar, dan sisanya mengikuti proses Pembelajaran di luar Program Studi.
c) Total beban sks (satuan kredit semester) selama studi untuk program sarjana minimum sebanyak 144 sks dan maksimum160 sks.
d) Mahasiswa diberikan 1 (satu) semester atau setara 20 sks untuk mengikuti pembelajaran di luar PS di lingkungan UPNVJT dan paling lama 2 (dua) semester atau setara 40 SKS untuk mengikuti pembelajaran di luar UPNVJT.
e) Mengikuti program MBKM dalam bentuk kuliah atau non kuliah dengan memilih program-program sebagaimana dalam gambar 10.1.



Gambar 10.1. Bentuk Kegiatan Pembelajaran MBKM

XI. RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Rencana Pembelajaran Semester (RPS) merupakan dokumen perencanaan dalam pembelajaran yang disusun sebagai dasar atau sebagai penduan bagi dosen dan mahasiswa Prodi Administrasi Publik FISIP UPN "Veteran" Jawa Timur dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan selama satu semester. RPS berfungsi sebagai: Panduan studi mahasiswa dalam memberikan gambaran alur pembelajaran, tujuan, materi dan metode evaluasi; Kontrak pembelajaran yang disepakati anatara dosen dan mahasiswa tentang beban belajar dan aturan perkuliahan; Pengendalian mutu, yang menjamin bahwa setiap mata kuliah mendukung Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL.

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

KEBIJAKAN PUBLIK

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

Agustus 2023

	UPN "VETERAN" JAWA TIMUR **FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK** **PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK**	**Kode Dokumen**

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)	**KODE**	**RUMPUN MK**	**BOBOT (sks)**		**SEMESTER**	**Tgl Penyusunan**
KEBIJAKAN PUBLIK	AP21007		**T= 3**	**P=0**	**III**	**5 Agustus 2023**

OTORISASI	**Pengembang RPS**	**Koordinator MK**	**Koordinator Program Studi**
	Dr. LUKMAN ARIF, M.Si.	**Dr. LUKMAN ARIF, M.Si.**	**Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si**

Capaian Pembelajaran (CP)	**CPL-PRODI Yang Dibebankan Pada Mada Kuliah**	
	CPL-3	Menguasai konsep dasar teori administrasi, politik, birokrasi, governansi publik, kebijakan dan pelayanan publik, perilaku organisasi, keuangan negara, reformasi administrasi, serta prinsip administrasi publik, manajemen publik, teori organisasi, manajemen SDM sektor publik, keuangan publik, kepemimpinan, dan pengambilan keputusan
	CPL-4	Menguasai konsep dan metode penelitian administrasi serta kebijakan publik dengan pendekatan inovatif untuk menganalisis data, menyelesaikan masalah di bidang keahlian melalui kajian ilmiah yang disusun dalam skripsi atau laporan tugas akhir berdasarkan analisis data dan informasi, serta sesuai dengan kaidah ilmiah dan statistik
	CPL - 6	Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja, mengolah informasi untuk menyusun analisis dan rekomendasi kebijakan, bertanggung jawab atas kinerja dan evaluasi tugas kelompok kerja dalam ruang lingkup administrasi publik, mengidentifikasi dan menganalisis interaksi antaraktor dalam penerapan manajemen pelayanan publik di tingkat lokal maupun nasional.

	CPL - 7	Menguasai konsep dasar kebijakan publik dan analisis kebijakan publik dengan beragam metode dan alat, Mampu mengolah informasi sebagai pendukung penyusunan rekomendasi kebijakan, dan Mampu menyusun analisis kebijakan dalam ruang lingkup dan kompleksitas yang tertentu.
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	
	CPMK 1	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep-konsep dasar kebijakan publik dan ruang lingkup kebijakan publik (CPL-3).
	CPMK 2	Mampu menganalisis interaksi dan peran aktor, birokrasi, dan dinamika tata kelola dalam proses kebijakan (CPL-6).
	CPMK 3	Mampu menerapkan metode dan alat analisis kebijakan untuk memecahkan masalah publik secara inovatif dan ilmiah mengevaluasi kebijakan. (CPL-4, CPL-7).dan
	CPMK 4	Mampu menyusun rekomendasi kebijakan (policy brief) berdasarkan hasil olah data dan informasi yang valid (CPL-7).
	Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)	
	Sub CPMK -1	Mahasiswa mampu menjelaskan berbagai definisi kebijakan Publik dari para Ahli dan arti penting studi kebijakan publik serta menyimpulkan unsur-unsur pokok dari definisi kebijakan publik.
	Sub CPMK -2	Mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup dan jenis-jenis Kebijakan Publik
	Sub CPMK -3	Mahasiswa mampu mengidentifikasi aktor-aktor dan interaksi antaraktor dalam kebijakan
	Sub CPMK -4	Mahasiswa mampu menganalisis dinamika jejaring kebijakan (*Policy Networks*)
	Sub CPMK -5	Mahasiswa dapat menjelaskan agenda setting dan formulasi kebijakan publik.
	Sub CPMK -6	Mahasiswa mampu memahami dan menganalisis masalah dalam implementasi kebijakan publik.
	Sub CPMK - 7	Mahasiswa mampu menganalisis peran para aktor politik dalam proses kebijakan publik.

	Sub CPMK - 8	Mahasiswa mampu memahami dan menganalisis kebijakan publik yang dibuat lembaga politik atau pemerintahan.
	Sub CPMK - 9	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan kebijakan dalam isu-isu kontemporer.
Deskripsi Singkat MK	Mata Kuliah Kebijakan Publik pada program studi ilmu politik diberikan kepada mahasiswa administrasi publik UPNVJT bertujuan untuk menjawab kebutuhan dunia kerja dibidang pemerintahan, politik, dan pelayanan publik. Kebutuhan tersebut adalah kemampuan perumusan kebijakan, analisis kebijakan, hingga menciptakan ide kebijakan publik yang bisa menjawab permasalahan publik. Selain itu, mata kuliah kebijakan public membahas konsep-konsep dasar kebijakan publik, yang mencakup makna dan ruang lingkup kebijakan publik, sistem kebijakan, pendekatan, proses kebijakan, dan lingkungan kebijakan.	
Bahan Kajian / Materi Pembelajaran	1. Makna dan Arti Penting Konsep Kebijakan Publik, Ruang Lingkup Kebijakan Publik. 2. Tujuan dan Model-Model Kebijakan Publik. 3. Formulasi Kebijakan Publik (Agenda Setting, Formulasi) 4. Implementasi Kebijakan Publik 5. Evaluasi Kebijakan Publik 6. Kinerja Kebijakan Publik 7. Inovasi Kebijakan Publik	
Pustaka	**Utama:**	
	1. Anderson, James E.2011, Public Policy Making, 2. Howlett, Michael dkk. (2009). *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems*. OUP Canada 3. Nugroho, R. (2017). *Public Policy*, edisi ke 6. Jakarta: Elex Media. 4. Wahab, S. A. (2012). Analisis kebijakan: dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik. Jakarta: Bumi Aksara. 5. Alamsyah, K. (2016). Kebijakan Publik, Konsep, dan Aplikasi. Media Citra Mandiri Press. Bandung. 6. Tahir, A. (2014). Kebijakan publik dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penerbit Alfabeta. 7. Wibawa, S. (2011). Politik Perumusan Kebijakan Publik. Yogyakarta: Graha Ilmu. Agustino, L. (2006). Politik dan Kebijakan publik. AIPI Bandung.	
	Pendukung:	

	1. Farazmand, A., & Carter, R. (Eds.). (2004). *Sound governance: Policy and administrative innovations*. Greenwood Publishing Group. **2.** Pusat Invovasi Tata Pemerintahan Deputi Inovasi Administrasi Negara, 2014, Handbook Administrasi Negara, (Lembaga Administrasi Negara Pusat Intan – Dian – LAN)DeLeon, P. (1997).
Dosen Pengampu	**Dr. Lukman Arif, M.Si.**
Matakuliah Syarat	

Mg Ke-	**Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)**	**Penilaian**		**Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa [Estimasi Waktu]**		**Materi Pembelajaran [Pustaka]**	**Bobot Penilaian (%)**
		Indikator	**Kriteria & Bentuk**	**Luring**	**Daring**		
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**
1	Mampu memahamiAturan Penilaian, RPS, Silabus serta Kontrak Kuliah yang disepakati. Mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup kebijakan publik.	Pemahaman tentang deskripsi matakuliah, kedisiplinan dalam melaksanakan kontrak kuliah. Ketepatan memahamimateri terkait; Kemampuan dalam menjelaskan konsep dan ruang lingkup kebijakan publik.	✓ Kehadiran; ✓ Kelengkapan dalam mencatat penjelasan dosen; ✓ Keaktifan bertanya dan terlibat dalam diskusi	Lecture; Contextual Learning;Diskusi; [TM: (3x50")] [PT+BM: (1+1) x (3x60")]	• e-Learning • Zoom Meeting • WAG	• RPS • Peraturan Akademik • Kontrak Perkuliahan • Aturan Penilaian • Konsep dan Ruang Lingkup KebijakanPublik	

2	Mampu memahami arti,makna dan tujuan kebijakan publik. Mampu memahami paradigm dan model-model kebijakan publik	Kemampuan menjelaskan materikuliah. Ketepatan dalam menjawab pertanyaanmateri kuliah.	✓ Kehadiran; ✓ Kelengkapan dalam mencatat penjelasan dosen; ✓ Keaktifan bertanya dan terlibat dalam diskusi	Lecture; Contextual Learning;Diskusi; [TM: (3x50")] [PT+BM: (1+1) x (3x60")]	• e-Learning • Zoom Meeting • WAG	• Konsep dasar kebijakanpublik • Paradigm kebijakanpublik • Definisi dan maknakebijakan publik • Model kebijakan publik	

3	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan mengenai model-model kebijakan publik. (Lanjutan)	Kemampuan dalam memahami dan menjelaskan mengenai model-model yang ada dalam kebijakan publik	✓ Kehadiran; ✓ Kelengkapan dalam mencatat penjelasan dosen; ✓ Kemampua nmenjawab pertanyaan ✓ Keaktifan bertanya dan terlibat dalam diskusi	Lecture; Contextual Learning;Diskusi; [TM: (3x50")] [PT+BM: (1+1) x (3x60")]	• e-Learning • Zoom Meeting • WAG	• Model-model Kebijakan Publik dari para pakar.	
4	Mahasiwa mampu memahami dan menjelaskan Formulasi Kebijakan Publik	Ketepatan menjelaskan dan memahami materi terkait proses kebijakan dan agenda setting dalam proses perumusan kebijakan publik	✓ Kehadiran; ✓ Kelengkapan dalam mencatat penjelasan dosen; ✓ Kemampua nmenjawab pertanyaan ✓ Keaktifan bertanya dan terlibat dalam diskusi	Lecture; Contextual Learning;Diskusi; [TM: (3x50")] [PT+BM: (1+1) x (3x60")] Penugasan Mahasiswa	• e-Learning • Zoom Meeting • WAG • Exercises	• Proses kebijakan • Agenda Setting dalam Formulasi Kebijakan	

5	Mahasiswa mampu memahami konsepsi tentang implementasi kebijakan	Ketepatan menjelaskandan memahami materi tentang implementasi kebijakan publik antar daerah. Kemampuan dalam memahami dan menjelaskan mengenai konsep implementasi kebijakan ;	✓ Kehadiran; ✓ Kelengkapan dalam mencatat penjelasan dosen; ✓ Kemampuanmenjawab pertanyaan ✓ Keaktifan bertanya dan ✓ terlibat dalam diskusi	Lecture; Contextual Learning;Diskusi; [TM: (3x50")] [PT+BM: (1+1) x (3x60")]	• e-Learning • Zoom Meeting • WAG	• Proses perumusan, analisis, formulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan (*general*) • Model-model kebijakanpublik • Pengertian modelkebijakan • Kebijakan publiksebagai proses teknokratis dan demokratis	
6	Mahasiswa mampu memahami dan menganalisa model implementasi kebijakan publik	Ketepatan menjelaskandan memahami materi terkait model implementasi kebijakan publik dalam	✓ Kehadiran; ✓ Kelengkapan dalam mencatat penjelasan dosen; ✓ Kemampuanmenjawab pertanyaan ✓ Keaktifan bertanya dan ✓ terlibat	Lecture; Contextual Learning;Diskusi; [TM: (3x50")] [PT+BM: (1+1) x (3x60")] Penugasan Mahasiswa	• e-Learning • Zoom Meeting • WAG • Exercises	• Model-model implementasi jika kebijakan.	

			dalam diskusi				
7	Mahasiswa mampu mengidentifikasi danmerumuskan setelah masalah kebijakan, serta mampu mengukur kinerja dalam implementasi kebijakan publik yangideal	Kemampuan mengidentifikasi danperumusan masalah implementasi kebijakan Ketepatan menjelaskan dan memahami materi dalam menganalisa kinerja implementasi kebijakan.	✓ Kehadiran; ✓ Kelengkapan dalam mencatat penjelasan dosen; ✓ Keaktifan bertanya dan terlibat dalam diskusi	Lecture; Contextual Learning;Diskusi; [TM: (3x50")] [PT+BM: (1+1) x (3x60")]	• e-Learning • Zoom Meeting • WAG	• Karakteristik masalahkebijakan • Mengukur	

8	**Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengan Semester**						
9	Mahasiswa dapat menjelaskan konsep-konsep mengenai evaluasi implementasi (Part 1)	Kemampuan dalam menjelaskan mengenai konsep Evaluasi Kebijakan (Part 1)	✓ Kehadiran; ✓ Kelengkapan dalam mencatat penjelasan dosen; ✓ Kemampuan menjawab pertanyaan ✓ Keaktifan bertanya dan terlibat dalam diskusi	Lecture; Contextual Learning;Diskusi; [TM: (3x50")] [PT+BM: (1+1) x (3x60")]	• e-Learning • Zoom Meeting • WAG •	• Konsep Evaluasi Kebijakan. • Tujuan Evaluasi Kebijakan	
10	Mahasiswa dapat menjelaskan pendekatan dan indicator evaluasi kebijakan (Part 2)	Kemampuan dalam menjelaskan pendekatan dan indicator evaluasi kebijakan (Part 2)	✓ Kehadiran; ✓ Kelengkapan dalam mencatat penjelasan dosen; ✓ Kemampuan menjawab pertanyaan ✓ Keaktifan bertanya diskusi ✓ *Ontime* mengumpulkan tugas	Lecture; Contextual Learning;Diskusi; [TM: (3x50")] [PT+BM: (1+1) x (3x60")] Penugasan Mahasiswa Review Jurnal	• e-Learning • Zoom Meeting • WAG • Exercises	• Pendekatan dalam evaluasi Kebijakan. • Indicator evaluasi kebijakan.	

11	Mahasiswa mampu menganalisis Inovasi kebijakan publik (Part 1)	Kemampuan melakukan analisis inovasi kebijakan publik (Part 1)	✓ Kehadiran; ✓ Kelengkapan dalam mencatat; ✓ Kemampua nmenjawab pertanyaan ✓ Keaktifan bertanya dan terlibat dalam diskusi	Lecture; Contextual Learning;Diskusi; [TM: (3x50")] [PT+BM: (1+1) x (3x60")]	• e-Learning • Zoom Meeting • WAG	• Inovasi Kebijakan publik	

12	Mahasiswa mampu menganalisis Inovasi kebijakanpublik (Part 2)	Kemampuan melakukan analisis Inovasi kebijakan publik (Part 2)	✓ Kehadiran; ✓ Kelengkapan dalam mencatat; ✓ Kemampuan menjawab pertanyaan Keaktifan bertanya dan terlibat dalam diskusi ✓ *Ontime* mengumpulkan tugas	Lecture; Contextual Learning;Diskusi; [TM: (3x50")] [PT+BM: (1+1) x (3x60")] Penugasan Mahasiswa FGD	• e-Learning • Zoom Meeting • WAG • Exercises	• Inovasi Kebijakan Publik	
13	Mahasiswa mampu Melakukan analisisi Kinerja Kebijakan Publik.	Kemampuan melakukananalisis kinerja kebijakan publik	✓ Kehadiran; ✓ Kelengkapan dalam mencatat penjelasan dosen; ✓ Keaktifan bertanya dan terlibat dalam diskusi	Lecture; Contextual Learning;Diskusi; [TM: (3x50")] [PT+BM: (1+1) x (3x60")]	• e-Learning • Zoom Meeting • WAG	• Analisis Kinerja dampak kebijakan	

14	Mahasiswa mampu melakukan analisis kinerja kebijakan publik (Part 2)	Kemampuan melakukananalisis kinerja kebijakan publik (Part 2)	✓ Kehadiran; ✓ Kelengkapan dalam mencatat penjelasan dosen; ✓ Keaktifan bertanya dan terlibat dalam diskusi	Lecture; Contextual Learning;Diskusi; [TM: (3x50")] [PT+BM: (1+1) x (3x60")]	• e-Learning • Zoom Meeting • WAG	Analisis Kinerja Kebijakan Publik	

15	Mahasiswa mampu memahami isu-isu kontemporer didalam kajian kebijakan publik, serta mampu menggunakan teori dan konsep kebijakan sebagai alat analisis kebijakan.	Ketepatan memahami isu-isu kontemporer didalam kajian kebijakan publik, serta mampu menggunakan teori dan konsep kebijakan sebagai alat analisis.	✓ Kehadiran; ✓ Kelengkapan dalam mencatat penjelasan dosen; ✓ Keaktifan bertanya dan terlibat dalam diskusi	Lecture; Contextual Learning;Diskusi; [TM: (3x50")] [PT+BM: (1+1) x (3x60")] Penugasan MahasiswaCase Study	• e-Learning • Zoom Meeting • WAG • Exercises	• Analisis kebijakan publik kontemporer	
16	**Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester**						

Prosentase Bobot Penilaian:

1) Tugas : 20
2) Presentasi : 10
3) UTS : 35
4) UAS : 35

XII. PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Program Studi Administrasi Publik sudah memiliki beberapa perangkat yang mengatur pelaksanaan pembelajaran di tingkat program studi yang meliputi:

a. Tim Gugus Penjamin Mutu Program Studi (GPMP)
b. Tim MBKM Tingkat Program Studi.

No	Aktifitas	Pejabat
1	Penanggung jawab dalam penyusunan kurikulum	Koordinator Program Studi
2	PIC Perangkat pembelajaran (RPS, RAE dan RT) MK pada Kurikulum	Dosen Pengampu Mata Kuliah
3	PIC monitoring dan evaluasi pelaksanaan kurikulum (mengacu pada perangkat pembelajaran) ● Pemeriksaan kesesuaian soal dengan CPMK dan / CPL ● Pemeriksaan lama waktu asesmen dengan bobot sks MK	Koordinator Program Studi
4	PIC monev pelaksanaan MBKM ● Pemeriksaan lama waktu kegiatan MBKM ● Pemeriksaan kesesuaian kemampuan yang diperoleh dengan CPL ● Pemeriksaan kesesuaian bentuk dan teknik dalam asesmen dengan CPL ● Pemeriksaan panduan untuk mahasiswa, dosen pembimbing di lapangan, dan dosen pembimbing Prodi	Tim MBKM Program Studi
5	PIC monitoring dan evaluasi ketercapaian CPL, serta pelaporan ketercapaian CPL	Tim Gugus Penjamin Mutu